

EKSISTENSI KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DIANTARA KRISIS PANDEMI COVID-19 DAN DIGITAL DISRUPTION

Iwan Kurniawan

Mahasiswa Doktor Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: pslgcbbangda@gmail.com

ABSTRACT

Leadership in times of crisis has a vital role, therefore the decisions chosen can improve the situation or make things worse. This article looks at the phenomenon of leadership from two things, namely during the pandemic and the momentum of digital disruption. These two things are closely related and occur simultaneously. No less important than adapting to a new form is conformity to the conditions needed to become something new that people eventually become accustomed to. This article uses a variety of primary and secondary data as well as field facts that have occurred in Indonesia for the past three years and uses a qualitative descriptive method, this method is considered appropriate to explain, describe and analyze this discussion.

Keywords: Leadership, Pandemic, Digital Disruption

INTRODUCTION

Suatu organisasi baik itu formal maupun nonformal dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat memberikan semangat kepada bawahannya, karena keberadaannya sangat penting untuk menjadi panutan bagi para bawahannya. Dengan adanya kepemimpinan akan membedakan karakteristik suatu organisasi dengan organisasi lainnya (Kamarasyid, 2019). Pemimpin merupakan penentu berhasil atau tidaknya suatu organisasi. Pemimpin dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja para bawahannya (Nanda & Putri, 2021). Gaya kepemimpinan merupakan faktor penting ketika dikaitkan dengan proses kinerja manajerial organisasi (Tahar & Abdillah, 2021). Kepemimpinan berpotensi berjalan efektif, serta memiliki derajat yang tinggi apabila seorang pemimpin memiliki tiga kelebihan, yakni kelebihan dalam bidang rasio/intelektual, kelebihan dalam bidang rohani, dan kelebihan dalam bidang jasmani (Setiawan & Fauzi, 2019).

Selain itu juga kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta tanggung jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan wewenangnya yang telah didelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya (Sufriadi, 2018). Untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas maka semua konsep kepemimpinan ini harus diterapkan bagi seluruh sumber daya yang terlibat, khususnya yang terlibat dalam penyelenggaraan negara tidak hanya untuk para elit yang mempunyai jabatan sebagai pucuk pimpinan tetapi juga untuk seluruh para birokratnya (Nuranita, 2019). Organisasi pemerintah sering melanggengkan gaya kepemimpinan yang belum tentu kondusif untuk mencapai budaya organisasi yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan aparatur (DeBerry & County, 2019). Oleh karena itu pemimpin yang dibutuhkan di masa depan adalah yang memiliki integritas kepemimpinan. Kepemimpinan yang berintegritas diperlukan untuk mendapatkan pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian, upaya penguatan integritas kepemimpinan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya (Mukhlis & Akbar, 2018). Integritas lebih dari sekedar etika. Integritas adalah satu kesatuan karakter individu. Integritas yang menimbulkan kepercayaan individu merupakan ciri orang yang konsisten mempertimbangkan kasih sayang, sikap, transparan, jujur dan etis. Karakteristik kepercayaan berhubungan dengan integritas.

Pemimpin organisasi ingin tahu bagaimana bersaing dan bertahan. Mereka ingin tahu cara terbaik untuk memimpin selama krisis yang tidak terduga. Mereka dapat memulai dengan menggunakan tahapan dalam model yang diusulkan. Ada kebutuhan untuk pengujian model di masa depan. Peneliti kepemimpinan memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian yang dapat menguji model dan meningkatkan kinerja pemimpin di tingkat organisasi atau nasional.

Pandemi virus corona telah memberikan tuntutan yang sangat besar bagi para pemimpin di sektor bisnis maupun sektor-sektor lainnya. Ketika para pemimpin menyadari terjadinya krisis, mereka dapat memulai memikirkan bagaimana merespon terhadap peristiwa tersebut. Hal yang dibutuhkan oleh para pemimpin saat terjadi krisis bukanlah penanganan yang telah terencana sebelumnya, melainkan perilaku dan pola pikir yang dapat mencegah reaksi yang berlebihan terhadap krisis dan bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Saat terjadi krisis, para pemimpin perlu menghilangkan keyakinan bahwa respon yang bersifat *top-down* akan membawa stabilitas. Untuk menangani keadaan darurat, pada umumnya perusahaan mengandalkan struktur *command-and-control* untuk mengelola kegiatan operasionalnya dengan baik dengan menerapkan respon yang terencana. Namun, dalam krisis yang penuh dengan ketidakpastian, para pemimpin menghadapi masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya.

Di Indonesia yang menjadi salah satu masalah utama selain kecakapan pemimpin untuk mengerti akar permasalahan yakni juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi pandemi sebagai suatu masalah bersama yang harus dipecahkan bersama. Dalam hal ini pemerintah harus bergerak bersama masyarakat dan saling memiliki keterbukaan terait apa yang palng dibutuhkan pada hari ini (Maulana, 2020). Pandemi Covid-19 telah sangat mempengaruhi perekonomian berbagai negara di dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Pandemi yang berlangsung sejak awal tahun 2020 berdampak terhadap perekonomian baik rumah tangga, UMKM, korporasi, serta pelaku ekonomi lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di masa Pandemi Covid-19, 2021

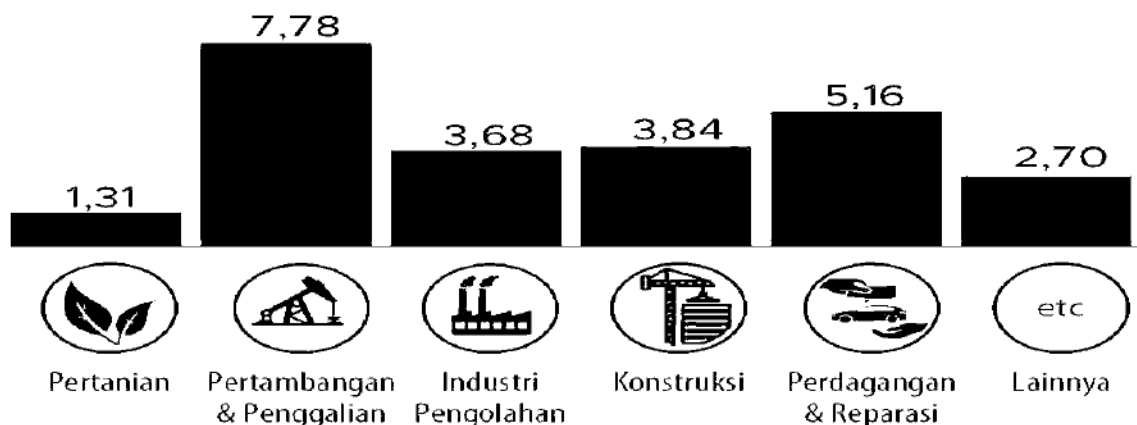


Sumber : BPS, 2021.

Kinerja perekonomian global mengalami penguatan di 2021, meskipun tertahan oleh penyebaran pandemi Covid-19 varian Delta, disrupsi di sisi supply serta meningkatnya tekanan inflasi di sejumlah negara maju dan negara berkembang lainnya. Pelonggaran restriksi sosial di banyak negara turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi global (Wijaya & Handrisal, 2021), tercermin pada menurunnya angka pengangguran, data PMI manufaktur yang terus berada di zona ekspansi, serta meningkatnya aktifitas perdagangan dunia. Kinerja pertumbuhan global diperkirakan mengalami *rebound* cukup kuat di tahun 2021. Pandemi Covid-19 telah menciptakan tantangan besar dalam mengatasi meningkatnya pengangguran. Pada Agustus 2020, pandemi mengakibatkan

sekitar 29,12 juta orang atau 14,28% penduduk usia kerja dikategorikan menganggur, tidak bekerja sementara, tidak masuk angkatan kerja, dan bekerja dengan pengurangan jam kerja.

Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha



Sumber : BPS, 2021

Meskipun perubahan ini terjadi sebagai darurat bencana, kini dunia sedang memasuki era dirupsi digital. Masa pandemi covid-19 saat menjadi momentum bagi sektor publik untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi digital. Istilah kepemimpinan digital eksis ketika adanya revolusi industri 4.0 yang menyebabkan adanya transformasi digital. Untuk menunjang transformasi digital, *digital leadership* menjadi komponen penting. Pemimpin digital merupakan seseorang yang mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Artikel ini bertujuan untuk melihat perkembangan kepemimpinan di pemerintahan dalam melakukan transformasi digital pada sektor publik dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik ditengah pandemi Covid-19 saat ini, penting bagi Aparatur Pemerintah untuk memiliki kemampuan *digital leader*.

Dari beberapa contoh pemimpin besar dunia kita bisa melihat bahwa ada berbagai macam jenis pemimpin dan tipe kepemimpinan. Hal tersebut sama seperti saat kita akan mendefinisikan kata demokrasi, cinta, maupun kedamaian. Meskipun kita masing-masing secara intuitif tahu apa yang kita maksudkan dengan kata-kata seperti itu, namun kata-kata tersebut dapat memiliki makna yang berbeda untuk orang yang berbeda (Fajar & Hanita, 2020).

Sebuah tinjauan literatur kepemimpinan politik dan publik mengungkapkan bahwa harapan mengenai apa artinya memberlakukan kepemimpinan di bidang politik telah beradaptasi dengan penekanan yang lebih besar ditempatkan pada pendekatan kolektif sebagai sarana untuk mendamaikan masalah kepemimpinan dalam struktur demokrasi (Lees-Marshment & Smolović Jones, 2018). Sejumlah besar literatur kepemimpinan menyelidiki berbagai jenis perilaku kepemimpinan yang dimaksudkan untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan pencapaian tujuan (An et al., 2019). Ada kecenderungan yang tidak menguntungkan untuk mereduksi studi kepemimpinan politik menjadi studi tentang pemimpin individu dan kepribadian mereka yang kurang lebih karismatik dan tindakan heroik atau skandal (Torfing et al., 2019). Melalui desain dan

implementasi aturan, organisasi publik mendistribusikan sumber daya, memberdayakan karyawan, mengomunikasikan keadilan dan kepercayaan, dan memberikan pemahaman (Vogel et al., 2020).

Pemanfaatan teknologi komunikasi informasi (selanjutnya disebut ICT) dalam segala kegiatan dan digitalisasi gagasan mengubah persepsi manajemen organisasi, proses pengendalian, akuntabilitas hasil dan evaluasi efisiensi kegiatan (Toleikienė & Juknevičienė, 2019). Menurut Silcock *e-Government* adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan pengiriman layanan pemerintah untuk memberi manfaat bagi warga negara, mitra bisnis, dan karyawan. E-Government terus mendorong untuk berinovasi dan menciptakan, mengembangkan mode layanan publik baru di mana semua organisasi publik dan instansi pemerintah memberikan layanan yang modern, terintegrasi, dan tanpa batas bagi warganya. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah bukanlah lagi searah yakni *top-down* melainkan membangun kemitraan antara pemerintah dan warga negara (Lumbanraja, 2020). E-Government bukanlah suatu konsep yang begitu saja dapat diimplementasikan atau diterapkan. Penerapan e-Government memerlukan perubahan baik dari segi proses bisnis (*Business Process Reengineering*) maupun struktur organisasi. Banyak penulis dan lembaga konsultan mencoba mendesain model/bentuk organisasi yang baru itu namun sampai sekarangpun masih belum ditemukan suatu bentuk baku yang dapat dipakai di seluruh organisasi pemerintah yang ada. Hal itu disebabkan oleh keunikan masing-masing organisasi baik ditinjau dari segi struktur, core business, maupun stakeholder-nya.

Pelaksanaan *e-government* dimulai dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Secara normatif, Instruksi Presiden tersebut mengawali pengembangan e-Government di Indonesia. Pemerintah telah menyadari akan potensi dan peluang pendayagunaan e-government bagi kemajuan bangsa dan negara khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien. E-Government diyakini dapat menjadi salah satu solusi bangsa untuk menjawab permasalahan yang muncul akibat tuntutan perubahan sehingga optimalisasi pemanfaatan kemajuan e-government sangat diperlukan.

Konsep *e-leadership* dalam organisasi swakelola lokal dipengaruhi oleh gagasan digitalisasi dan *e-government*, transformasi kepemimpinan dan proses manajemen, dan kekhususan tingkat pemerintahan lokal di negara tertentu. Indonesia sebagai negara maritim masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mengimplementasikan ide *e-leadership* di sektor pemerintahan baik pusat maupun daerah. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, maka diperlukan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Untuk melaksanakannya, pemimpin harus melaksanakan otonomi daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah (Abror et al., 2020). Alasan pentingnya *e-leadership* adalah perubahan pola organisasi yang difasilitasi oleh revolusi digital. Munculnya tim, kerja jarak jauh, dan pola kepemimpinan terdistribusi sangat bergantung pada komunikasi elektronik yang dipercepat yang harus dikuasai, dikelola, dan dikoordinasikan oleh para pemimpin (Van Wart et al., 2019).

Melalui penerapan teknologi informasi yang tepat maka seorang manajer dapat menerapkan konsep dan cara kerja *e-leadership*. Namun demikian, tidak sedikit organisasi atau perusahaan saat ini yang masih dipimpin oleh manajer yang belum menyadari dan belum mampu memanfaatkan keunggulan konsep dan cara kerja teknologi informasi yang disebut dengan *e-leadership* untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinannya. Kepemimpinan itu tidak terbatas pada suatu pekerjaan atau posisi, tetapi menggambarkan kemampuan untuk membawa orang, sumber daya dan peralatan bersama-sama untuk memecahkan permasalahan dan mencapai hasil.

Dewasa ini, teori kepemimpinan virtual (*e-leadership*) lahir sebagai respon atas pesatnya kemajuan teknologi digital yang merambah dunia pendidikan. Kepemimpinan virtual didefinisikan sebagai proses pengaruh yang dimediasi oleh teknologi informasi dan komunikasi sehingga menghasilkan kinerja, perilaku, dan sikap anggota organisasi. Ketika para pemimpin memutuskan tindakan, mereka harus bertindak dengan tegas. Ketegasan yang terlihat tidak hanya akan membangun kepercayaan organisasi pada pemimpin; namun hal ini juga akan memotivasi jaringan satgas untuk terus mencari solusi atas tantangan yang dihadapi organisasi.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual, memeriksa kondisi dan praktik yang berlaku, membuat perbandingan dan evaluasi, dan menentukan untuk menghadapi masalah dari pengalaman untuk menetapkan rencana dan keputusan di masa depan. Metode deskriptif kualitatif akan menggambarkan bagaimana proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah melalui media daring. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui desk studi pada penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, situs web, dan media sosial.

RESULT AND DISCUSSION

Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Praktik Penanganan Pandemi

Pentingnya seorang pemimpin menyebabkan suatu organisasi seperti pemerintahan tidak akan pernah bisa berjalan lebih baik dan optimal tanpa seorang pemimpin. Meski pemimpin itu ada, tanpa integritas, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ada lima peran utama seorang pemimpin dalam pemerintahan, antara lain: Pertama, peran pengambil keputusan. Ini tentang bagaimana seorang pemimpin, terutama dalam birokrasi, memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah pekerjaan manajerial yang berarti memutuskan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya dan kapan harus dilakukan. Dalam hal ini, spesifikasinya adalah Subyek, prioritas, strategi, struktur formal, dan alokasi sumber daya, kinerja tanggung jawab dan pengaturan kegiatan.

Digitalisasi menjadi praktik manajemen sehari-hari organisasi sektor publik seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan akuntansi, kontrol dan pemantauan, hubungan masyarakat dan komunikasi, dll. Tugas berbasis TIK telah menjadi bagian integral dari kehidupan kerja di organisasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, *e-leadership* (sebagai konsep teoritis dan praktik) telah menjadi penting tidak hanya untuk swasta, tetapi juga untuk sektor publik (termasuk organisasi pemerintah daerah). Elemen utama dari kepemimpinan berbasis digital akan mencakup tantangan seperti komunikasi (miskomunikasi, komunikasi yang berlebihan, hilangnya interaksi informal, kesepian dan melemahnya rasa memiliki); motivasi (pemantauan karyawan dan pencapaian pencapaian, pengakuan, penghargaan, pengembangan karyawan); dan manajemen perubahan (sikap positif terhadap perubahan yang lebih sulit di lingkungan virtual). Semua tantangan tersebut perlu ditangani untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di lembaga pemerintahan.

Kemunculan pandemi Covid-19 secara drastis mengubah perilaku manusia di segala lini kehidupan. Tidak hanya kehidupan pribadi seseorang, namun dampak dari pandemi ini mengubah

kehidupan organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi non profit seperti sekolah. Semua sumber daya yang dimiliki organisasi harus diberdayakan semaksimal mungkin, terutama sumber daya manusia agar tercapai efektifitas dan efisiensi di saat krisis (Putera et al., 2022). Kanada, misalnya, mengusulkan model kepemimpinan strategis baru, yang menjadi domain penting untuk menyelidiki kasus nyata kepemimpinan strategis yang berkontribusi pada manajemen krisis COVID-19 (Farhan, 2021). Praktik kepemimpinan selama krisis COVID-19 pada tahun 2020 yang dapat menjadi dasar bagi model kepemimpinan strategis baru. Dalam melakukannya, kita dapat melihat praktik kepemimpinan Kanada di tingkat federal dengan berfokus pada pendekatan kepemimpinan Perdana Menteri Trudeau. Menggambar dari pendekatan kepemimpinan Kanada selama pandemi, model yang diusulkan disusun dalam empat tahap yaitu : Gathering, Protecting, Challenging, dan Integrating. Dengan kata lain, model yang diusulkan di sini didasarkan pada studi kasus tentang pengalaman kepemimpinan Kanada selama krisis COVID-19. Ini menjawab pertanyaan penelitian tentang seperti apa kepemimpinan itu dan bagaimana hal itu dapat membuat perbedaan dalam masa ketidakpastian ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Model kepemimpinan strategis yang diusulkan didasarkan pada praktik dan pendekatan kepemimpinan yang telah menunjukkan efek signifikan untuk mendukung bertahan dan mengatasi masalah.

Selama krisis COVID-19, pendekatan kepemimpinan yang otentik dan praktik moral telah ditunjukkan. Pemerintah memiliki target yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengambil tindakan untuk menjadi nilai bersama. Pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan berbagai macam bantuan dan subsidi untuk meringankan beban masyarakat selama pandemik. Kemudian berfokus pada cara pemimpin melayani dan memotivasi orang untuk mengatasi tantangan. Tahap Melindungi menunjukkan kemampuan pemimpin untuk memotivasi orang melalui melayani kebutuhan masyarakat akan stabilitas sosial dan kemakmuran ekonomi. Bisa dibilang, pada tahap ini, para pemimpin menunjukkan kemampuan mereka untuk menciptakan budaya kepedulian dan etika baru, dan menunjukkan pentingnya kepercayaan dan kerja tim.

Trend Kasus Harian Bulan Januari Tahun 2022



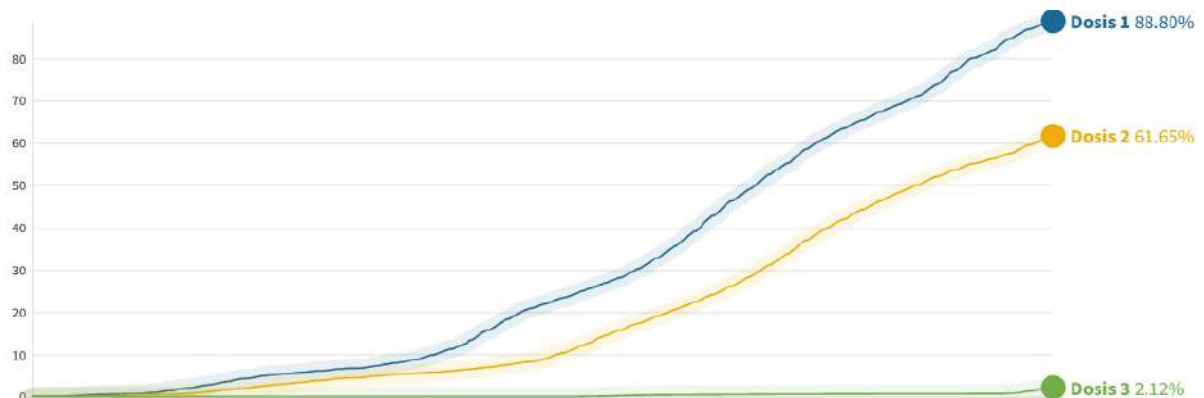
Sumber : KawalCovid.id, 2022

Dari sisi penanganan Covid-19, jumlah kasus kumulatif Covid-19 dunia mencapai 288,48 juta kasus. Di Indonesia, total kasus hingga akhir 2021 sebanyak 4,26 juta atau 1,6% dari populasi, dan berada di peringkat 147 negara dari 222 negara. Total kasus Covid-19 Indonesia jauh lebih rendah dibanding banyak negara besar lain seperti Brazil (22,3% dari populasi), AS (16,5%), Rusia (7,2%), atau India (2,5%). Dilihat dari jumlah kasus kematian akibat Covid-19 terhadap populasi,

peringkat Indonesia juga cukup rendah di dunia yakni 119, dengan total kematian 144 ribu atau 0,05% terhadap populasi. Berbagai indikator Covid-19 lain seperti positivity rate rata-rata 7 hari juga sangat rendah yakni 0,1%. Dalam hal vaksinasi, Indonesia telah memberikan sebanyak 276 juta dosis kepada masyarakat atau sudah mencapai sekitar 51% populasi di akhir tahun 2021. Total kumulatif vaksinasi yang telah Indonesia realisasikan merupakan nomor lima tertinggi di dunia.

Di dalam negeri meningkatnya aktivitas ekonomi tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Jumlah Capaian Vaksinasi



Sumber : KPCPEN, 2022.

Sebagaimana kalangan pimpinan sejumlah negara di dunia, kalangan elit pimpinan nasional, regional, lokal, dan nonformal di Indonesia mengalami sindroma kekagetan dan keabaihan di fase awal serangan Covid-19 (Solahudin et al., 2020). Dalam menghadapi situasi krisis seperti sekarang, kepemimpinan seorang kepala negara menjadi kunci untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. Rasanya kita perlu mengambil contoh pada negara seperti Cina, Singapura, Arab Saudi, Jerman, Vietnam, dan Malaysia. Setidaknya, negara-negara tersebut mampu bergerak cepat dalam mengidentifikasi warganya yang positif Covid-19 serta mampu menekan tingkat kematian.

Disrupsi Digital Sebagai Transformasi Kepemimpinan Dalam Akselerasi Pelayanan Publik

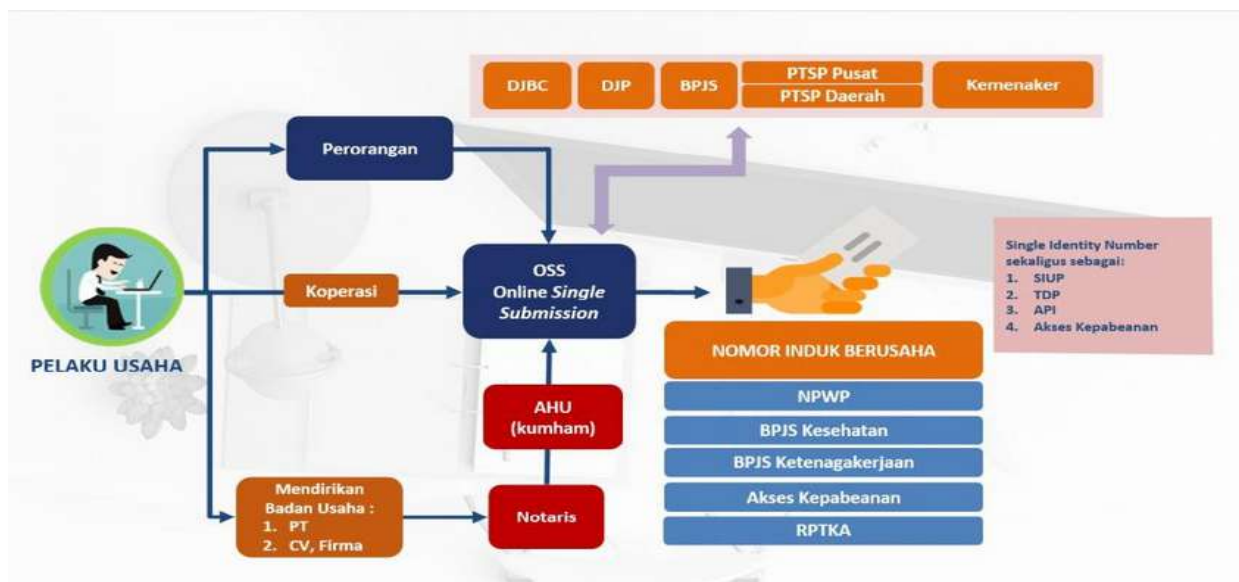
Dengan pemanfaatan teknologi saat ini, banyak hal yang bisa dibuat lebih cepat dan efisien dalam hal tata administrasi birokrasi. Banyak hal yang selama ini dianggap berbelit-belit dalam pelaksanaan administrasi birokrasi menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. Pada era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat pelayanan menjadi efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan (Lestari et al., 2021). Birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan penerapan *e-government*.

Berbagai macam layanan berbasis digital yang telah disiapkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini semata-mata untuk memudahkan layanan publik dengan konsep *paperless*. Kegiatan berbasis digital ini juga memfasilitasi koordinasi antar pemerintahan berbasis online. Sedangkan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat misalnya layanan kependudukan berbasis teknologi informasi. Hal ini memang sudah dikenal sejak lama, misalnya KTP Online (SIK) kemudian berkembang menjadi e-KTP. Pelayanan KTP Online adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara online baik bagi yang akan membuat KTP baru maupun yang akan melakukan perpanjangan. Dengan aplikasi ini pemohon KTP dapat melakukan permohonannya secara langsung, dengan mengklik menu yang tersedia pada website.

Hingga kini, banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, baik secara nasional maupun regional, seperti optimalisasi layanan online, pelayanan jemput bola, hingga operasionalisasi mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang berfungsi layaknya ATM untuk dokumen kependudukan.

Kemudian pelayanan izin terpadu online. Pelayanan perizinan adalah item yang paling populer saat ini, mulai dari stimulasi investasi untuk membangkitkan perekonomian Indonesia di masa Pandemi, serta kemudahan perizinan berusaha mulai dari UMKM hingga usaha skala besar. Pemerintah telah mengeluarkan aplikasi berbasis online khusus untuk layanan perizinan tersebut yaitu Online Single Submission (OSS). OSS atau Online Single Submission juga bertujuan sebagai bentuk reformasi pada bidang perizinan usaha. Karena awalnya izin yang diajukan harus melalui proses dan birokrasi panjang, dan secara fisik harus hadir. Dengan adanya OSS, maka masyarakat bisa mengurus izin usaha dengan lebih praktis, cepat, dan tanpa harus keluar dari rumah atau kantornya.

Mekanisme Perizinan Dasar OSS

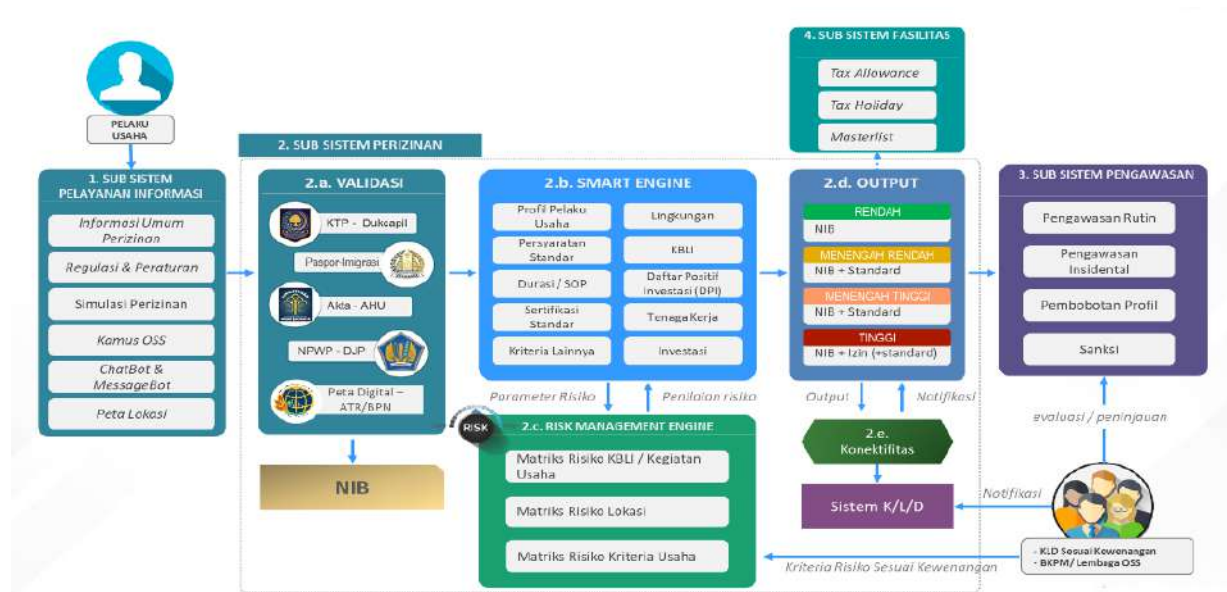


Sumber : BKPM, 2020

Sistem OSS hadir sebagai cara kerja baru dan arah kebijakan dalam reformasi layanan perizinan usaha di negeri ini. Semangat utama dari reformasi perizinan berbasis sistem OSS adalah mendorong kemudahan dan kepastian berusaha dengan pelayanan terstandar. Dalam penerapan OSS, tantangan dan hambatan masih dihadapi terutama pada tiga aspek yaitu regulasi, sistem dan

tata laksana. Sebagai sebuah platform penting dalam reformasi perizinan bagi kepastian dan kemudahan berusaha, keberadaan OSS patut didukung. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh, terintegrasi dan tidak terfragmentasi baik di level nasional maupun daerah dalam sebuah strategi reform. Dalam pelaksanaannya beberapa pihak diberikan hak akses terhadap OSS, di antaranya adalah BKPM untuk Pemerintah Pusat dan DPMPTSP baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk Pemerintah Daerah (Lestaringtyas & Roqib, 2021).

Gambaran Umum Sistem OSS Berbasis Resiko



Sumber : Kementerian Investasi, 2021.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2014) terdapat banyak perubahan fundamental baik proses dan syarat untuk mendirikan perusahaan maupun untuk mendapatkan izin usaha. Sebelumnya pemerintah membuat sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pengurusan izin usaha, namun pemerintah merasa masih kurang. Kemudian Indonesia melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian meresmikan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mempermudah para pelaku bisnis dalam melakukan pengurusan perizinan usahanya. Kemudahan dan kepastian berusaha merupakan tujuan inti yang hendak dituju dalam setiap niat reformasi regulasi dan perizinan. Kemudahan dan kepastian tersebut menjadi kondisi (*necessary condition*) dalam menciptakan iklim investasi, merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang produktif pada level operasional/komersial. Disini, reformasi perizinan diyakini menjadi jalan institusional guna mendorong tercapainya tujuan inti (kemudahan dan kepastian berusaha) sebagai prasyarat terciptanya iklim investasi yang kondusif.

CONCLUSION

Dalam konteks penanggulangan krisis (*crisis management*) maka faktor kepemimpinan (*leadership*) memegang peranan yang sangat krusial. Kualitas dari seorang pemimpin (*leader*) dapat

menentukan durasi, tingkat keparahan, dan konsekuensi akhir dari krisis. Para pemimpin mampu mengatur ritme penanggulangan crisis dengan langsung memberikan teladan serta menunjukkan perilaku yang diharapkan selama situasi krisis. Karena orang-orang di seluruh dunia memiliki tantangan ekonomi dan sosial yang sama, ada kebutuhan bagi para pemimpin yang memiliki kemampuan sosial untuk membangun visi dan budaya bersama, bekerja untuk membentuk tim, dan percaya pada pencapaian tim dan tanggung jawab bersama. Target di sini adalah untuk menarik orang untuk mempercayai pemimpin dan menerima visi pemimpin. Pada saat yang sama, para pemimpin perlu mengumpulkan orang-orang untuk mengatasi tantangan yang mereka miliki, dan juga menunjukkan desakan dan ketegasan mereka.

Ada dua kesimpulan umum yang ditarik dalam artikel ini yaitu, *pertama*, bagaimana kepemimpinan pemerintahan dalam menangani pandemi Covid-19 dengan beragam fitur informasi yang disediakan oleh pemerintah serta layanan bantuan finansial hingga informasi peta sebaran kasus Covid-19. Presiden pemilik kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan rakyat Indonesia dalam penanggulangan bencana. Disamping itu, pemerintah perlu terbuka memberikan informasi secara jujur kepada masyarakat terkait informasi Covid-19, Pemerintah harus dapat memberikan keyakinan bahwa apapun kebijakan yang diambil adalah yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. *Kedua*, masa pandemi menjadi momentum dalam penggunaan platform digital diberbagai sector termasuk pemerintahan. Hal yang paling menonjol adalah memangkas birokrasi pelayanan publik dengan menggunakan layanan berbasis teknologi informasi. Layanan yang digunakan pemerintah adalah Online Single Submission (OSS). Pada masa pandemi, maka layanan OSS menjadi pilihan utama disektor perizinan dalam rangka memudahkan pelayanan administrasi serta menjadi stimulan bisnis dan investasi dalam membangun perekonomian di Indonesia.

REFERENCES

- Abror, R. H., Suraji, Moehariono, Al Walid, K., & Harjoni. (2020). Philosophical Concept of Leadership in Supply Chain Affecting the Community Perception in the East Java Government of Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management*, 9(3), 1038–1045.
- An, S. H., Meier, K. J., Bøllingtoft, A., & Andersen, L. B. (2019). Employee Perceived Effect of Leadership Training: Comparing Public and Private Organizations. *International Public Management Journal*, 22(1), 2–28. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1497739>
- DeBerry, S., & County, W. (2019). Transformational Leadership Style and Organizational Culture in Government. *Journal of Academy of Business and Economics*, 19(1), 37–50. <https://doi.org/10.18374/JABE-19-1.4>
- Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 41). European Alliance for Innovation.
- Fajar, W. D. U., & Hanita, M. (2020). Covid-19 Untuk Memastikan Ketahanan Nasional (Crisis Leadership Strategy in Combating Covid-19 Pandemic To Ensure National Resilience). *Jurnal Lemhannas*, 8(2), 208–226. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/83/87/>
- Farhan, B. (2021). A New Strategic Leadership Model for Surviving and Coping: Lessons from

- Canada's Leadership Approach to COVID-19. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1883221>
- Gafar, T. F., Octavia, S., & Wijaya, M. (2022). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Ppupd) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(3), 539-552.
- Kamarasyid, A. (2019). Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah. *Mawa'izh : Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(2), 326-353. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738>
- Lees-Marshment, J., & Smolović Jones, O. (2018). Being More With Less: Exploring the Flexible Political Leadership Identities of Government Ministers. *Leadership*, 14(4), 460-482. <https://doi.org/10.1177/1742715016687815>
- Lestari, P. A., Tasyah, A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (e-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2), 212-224. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808>
- Lestaringtyas, T., & Roqib, M. (2021). Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Ossi 1.1 Dan Ossi Rba (Risk Basic Approach). *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 25-34. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1576>
- Lumbanraja, A. D. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 220-231. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7986>
- Maulana, I. (2020). Kepemimpinan Kolektif Era Pandemi di Indonesia. *Management and Business Review*, 4(1), 32-38. <https://doi.org/10.21067/mbr.v4i1.4606>
- Mukhlis, M., & Akbar, I. (2018). Strengthening the Integrity of Local Leadership and its Relevance to Run Democratic Governance. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 109. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no2.989>
- Nanda, I. G. A. A. Y., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2021). Good Government Governance, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Manajerial Penyelenggara Pemerintahan Desa. *EJurnal Akuntansi*, 31(8), 1999-2010. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p10>
- Nuranita, R. (2019). Kepemimpinan Horizontal Sebagai Seni Kepemimpinan Untuk Semua Orang Dalam Penerapannya Di Organisasi. *Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(1), 71-83. <https://doi.org/10.38075/tp.v13i1.14>
- Putera, A. R., Purwanto, N. A., Mulyadi, M., & Jannah, R. (2022). A Role of E - Leadership to Maintain Quality Culture in Islamic Boarding School in Post Covid-19 Pandemic Era. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(1), 59-80. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/hayula.006.01.04>
- Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7614>
- Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District

Pelalawan Regency.

- Solahudin, D., Eif, D., Amin, S., Sumpena, D., & Hilman, F. A. (2020). Analisis Kepemimpinan di Indonesia dalam Kerangka Tanggap-Darurat Covid-19. *Kepemimpinan Indonesia*, 2, 1–8.
- Sufriadi, D. (2018). Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh. *Journal ECo-Buss*, 1(2), 105–115. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>
- Tahar, A., & Abdillah, M. A. (2021). The Influence of Leadership Style on Managerial Performance of Village Governments with Motivation as Mediation. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 157–169. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.04.01.328>
- Toleikienė, R., & Juknevičienė, V. (2019). Presumptions for E-leadership in Local Self-Government in Rita Toleikienė Abstract : Theoretical framework. *Izzivi Prihodnosti / Challenges of the Future*, 4(3), 122–139. https://www.fos-unm.si/media/pdf/IP/Toleikiene_Juknevicienne_048.pdf
- Torring, J., Sørensen, E., & Bentzen, T. O. (2019). Institutional Design for Collective and Holistic Political Leadership. *International Journal of Public Leadership*, 15(1), 58–76. <https://doi.org/10.1108/ijpl-12-2018-0059>
- Van Wart, M., Roman, A., Wang, X. H., & Liu, C. (2019). Operationalizing the Definition of e-Leadership : Identifying the Elements of e-Leadership. *International Review of Administrative Sciences*, 85(1), 80–97. <https://doi.org/10.1177/0020852316681446>
- Vogel, D., Reuber, A., & Vogel, R. (2020). Developing a short scale to assess public leadership. *Public Administration*, 98(4), 958–973. <https://doi.org/10.1111/padm.12665>
- Wijaya, M., & Handrisal, H. (2021). Local Government Efforts in Encouraging the Existence of Subsistence Agriculture as an Alternative to the Supply of Food Needs in Lingga Regency. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7000-7012.
- Wijaya, M., & Handrisal, H. (2021). Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(01), 37-51.
- Zainal, Z., & Nurdasanah Putri, F. (2021). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District.